

**PENELITIAN TENTANG POLA RESTRUKTURISASI USAHA
PERTANIAN DAN USAHA KECIL PEDESAAN SERTA
IMPLEMENTASINYA TERHADAP REPOSISI
KELEMBAGAAN KOPERASI (2004)**

Negara Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki kondisi: a) sektor pertanian memegang peranan strategis sebagai sumber mata pencaharian bagi penduduk yang tersebar; b) memproduksi komoditas primer, baik untuk konsumsi maupun industri pengolahan; c) tempat pelepasan hasil industri; dan d) pertanian masih merupakan kantong penduduk miskin. Masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan sektor pertanian adalah belum tersedianya konsep dan strategi pembangunan pertanian yang jelas, dikaitkan dengan peranan kelembagaan koperasi yang mampu mengangkat tingkat pendapatan anggota koperasi dan masyarakat pedesaan. Apabila masalah tersebut berkelanjutan, dikhawatirkan akan membahayakan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Pemecahan masalah di atas, khususnya untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketertinggalan, peningkatan produktivitas ekonomi pedesaan dalam waktu 26 tahun terakhir (1969-2003), pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan, antara lain: a) melipatgandakan produksi pangan terutama beras melalui introduksi teknologi baru (bibit unggul dan pupuk); b) mendorong koperasi pedesaan untuk penyalur input dan pemasaran hasil pertanian; c) program pembangunan desa miskin melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT); d) pengembangan perkebunan inti rakyat di berbagai komoditas pertanian; dan e) berbagai program lain yang penting, yaitu *Green Revolution* (intensifikasi tanaman padi). Namun, berbagai terobosan program baru tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara baik.

Dalam mengantisipasi kondisi sebagaimana disebutkan di atas, kelembagaan koperasi perlu direposisi agar koperasi di perdesaan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Reposisi ini dimaksudkan supaya koperasi di perdesaan memiliki kompetensi untuk mengelola usaha pertanian, yaitu kegiatan agribisnis dan agroindustri, meliputi kegiatan: 1) *upstream* (hulu) yaitu penyaluran kredit dan sarana produksi; 2) *on-farm* yaitu produksi yang dilakukan oleh anggota; serta 3) *off-farm* (hilir) yaitu pengolahan dari yang sederhana sampai agroindustri dan pemasaran.

Penelitian ini bertujuan: 1) mengidentifikasi fleksibilitas kelembagaan koperasi dalam mengantisipasi dinamika perubahan akibat restrukturisasi usaha pertanian; 2) menganalisis partisipasi anggota koperasi dalam reposisi peran koperasi; 3) menyusun dan menyempurnakan model pembinaan dan pengembangan manajemen koperasi di bidang pertanian. Adapun aspek lingkup kajian meliputi: 1) melakukan studi dan evaluasi kondisi riil saat ini terhadap koperasi di bidang pertanian dan usaha kecil pedesaan; 2) mengklasifikasi tipe koperasi di bidang pertanian dan faktor-faktor penghambat; 3) menyusun desain pengembangan koperasi di bidang pertanian dan usaha kecil pedesaan; 4) menyusun *draft action* pengembangan koperasi di bidang pertanian.

Penelitian dilakukan di 10 provinsi meliputi 40 koperasi, yaitu 20 koperasi pertanian, 20 koperasi nonpertanian, dan sampel diambil secara *purposive sampling*. Data primer dan data sekunder diolah melalui tahapan: 1) memeriksa kelengkapan pengisian daftar pertanyaan; 2) memeriksa kesesuaian jawaban satu sama lain; 3) melakukan tabulasi dan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS versi 11.0.

Hasil penelitian dan analisis data secara garis besar adalah:

1. Sektor pertanian menyumbang 2,48% terhadap PDB nasional, namun jumlah petani gurem di Indonesia juga semakin meningkat. Usaha pertanian dikembangkan dengan cara usahatani intensifikasi, di samping dengan mengembangkan sektor off-farmnya. Industrialisasi pertanian kita diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi dan persaingan komoditas serta mendapatkan *value added* dari sektor pertanian. Karena itu, perlu dilakukan pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi industri olahan agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan membuka peluang ekspor.
2. Peran koperasi di sektor *off-farm* (industri pengolahan) pada usaha pertanian masih tergolong sangat rendah apabila dilihat dari status badan hukum sebagai industri pengolahan berbasis sektor pertanian. Kurang dari 1% jumlah koperasi yang usahanya bergerak dalam industri pengolahan pertanian, kecuali di subsektor peternakan lebih dari 3%. Pada usaha pertanian di sektor hilir (*off-farm*), sebagian besar industri termasuk di dalamnya usaha koperasi yang bergerak di industri pengolahan mengalami persaingan pasar oligopoli yang sangat ketat, seperti pada industri penggilingan dan penyosohan beras dengan rasio konsentrasi sebanyak delapan perusahaan terbesar (CR 8) hanya sebesar 25,72% pada tahun 2002. Hal ini memerlukan kebijakan pemerintah, sehingga diharapkan koperasi dapat melakukan monopoli pada industri pengolahan seperti pada pembelian cengkeh di zaman Orde Baru. Di samping itu, skala output koperasi sebagian besar hanya berada di bawah Rp 1 miliar, sehingga suntikan modal bagi koperasi sangat diperlukan, baik dari lembaga keuangan perbankan maupun dari pemerintah. Distribusi lokasi industri pengolahan di atas 80% masih terkonsentrasi di daerah Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah)

dan Sumatera Utara. Ini memberikan gambaran, bahwa dalam pembangunan industri pertanian antara lokasi industri dengan sumber bahan baku tidak satu tempat, sehingga akan menimbulkan biaya transportasi yang cukup besar. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan industri pengolahan sebagian masih diimpor, seperti pada industri pakan ternak, industri penggilingan, dan pembersihan padi-padian bahan bakunya di atas 40% masih diimpor.

3. Berdasar hasil survai tingkat partisipasi pertemuan kelompok tani yang aktif rata-rata 11-12 kali setahun seperti *Wire Single*, Lombok Barat, NTB, sedang koperasi yang pasif melakukan pertemuan anggota rata-rata 1 kali setahun. Anggota koperasi berinisiatif tinggi untuk mewujudkan kegiatan mendirikan koperasi pertanian (71,14%), penyaluran kredit di koperasi (71,4%), penyaluran sarana produksi pertanian (64,3%), dan pemasaran hasil pertanian (78,6%). Rangsangan anggota mengikuti kegiatan perkoperasian, terutama disebabkan untuk memperoleh kredit program (35,71%), kemudahan mendapatkan saprotan (19,05%), dan kemudahan dalam pemasaran hasil (14,29%). Alasan responden mau mengambil kredit, karena bunganya rendah (50%), pengembaliannya berjangka (28,57%), dan alasan lainnya (14,27%). Dalam proses pengambilan keputusan, 85,7% anggota koperasi menyatakan pengambilan keputusan penyaluran kredit usaha tani dilakukan melalui musyawarah kelompok, sedangkan keputusan untuk bermitra dengan pengusaha 28,6% diambil sesuai dengan keinginan anggota, dan 71,3% karena inisiatif pengurus.
4. Model pembinaan dilakukan dengan: a) peningkatan pengembangan skala usaha koperasi untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi pelaku ekonomi dilakukan dengan pemberian bantuan sarana usaha, bantuan perkuatan permodalan bergulir, peningkatan kualitas produk dengan pelatihan, mengadakan temu

usaha, dan konsultasi; b) peningkatan pengembangan bagi koperasi dalam rangka penciptaan kesempatan usaha, kepastian pasar, dan harga bagi usaha yang dikembangkan oleh koperasi; c) peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan koperasi; d) peningkatan dan pengembangan sarana usaha koperasi dalam rangka peningkatan kemampuan koperasi menggunakan teknologi yang sesuai dengan teknologi anggota; e) memfasilitasi serta melakukan mediasi dalam rangka melakukan kerjasama usaha antara Koptan, Puskoptan, Inkoptan dengan pihak swasta, BUMN, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha koperasi agribisnis dapat menerapkan model *agri supply chain management*;
2. Model koperasi tunggal komoditas dapat dikembangkan untuk subsektor perkebunan, subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perikanan, dan subsektor peternakan. Koperasi persusuan merupakan salah satu koperasi tunggal komoditas yang mampu berkembang dengan baik hingga saat ini;
3. Koperasi kredit pertanian tetap dipertahankan dan dikembangkan karena masih sangat diperlukan oleh petani untuk membiayai usahataniannya. Petani dilatih untuk menabung dan diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan dan mengembalikan kredit. Koperasi kredit pertanian merupakan basis dari pemberdayaan petani dan menjadi landasan bagi pengembangan kegiatan lainnya di sektor pertanian;
4. Koperasi yang unit usahanya dapat dijadikan contoh bagi pengembangan Koperasi Kredit Pertanian adalah KSU Kuta Mimba, Kuta, dan KUD Sulahan.